

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SEKTOR PUBLIK

Ridha Rahmadita Putri

ridharahmaditaputri@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is aimed to find out the influence of accountability, transparency, and supervision to the budget performance at Local Apparatus Working Unit (SKPD) in Surabaya. Quantitative research has been applied in this research. The data collection method has been done by using survey method. The research data uses primary data which has been carried out by issuing questionnaires to the respondents. The sample collection method has been conducted by using purposive sampling method and 78 respondents have been obtained as samples. The analysis technique has been carried out by using multiple linear regressions analysis. Based on the result of the hypothesis test, it can be concluded that: accountability gives positive influence to the budget performance, transparency gives positive influence to the budget performance and supervision gives positive influence to the budget performance.

Keywords: accountability, transparency, supervision, budget performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode survei. data penelitian yang digunakan adalah data primer dengan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* sehingga jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 78 responden. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran dan pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran.

Kata Kunci : akuntabilitas, transparansi, pengawasan, kinerja anggaran.

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik sangat erat kaitannya dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi di mana kebutuhan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan tuntutan publik akan transparansi serta akuntabilitas oleh pemerintah untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam melakukan kegiatan mengelola anggaran karena hasil akhir dari pengelolaan tersebut harus dipertanggungjawabkan serta diberikan secara terbuka kepada publik. Salah satu tuntutan yang paling penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan adanya pengelolaan anggaran (Pertiwi, 2015).

Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Menurut Sadjiarto, 2000 (dalam Adiwirya, 2015) menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah kerap terjadi sehingga masyarakat seringkali mempertanyakan kinerja

pemimpin daerah. Berbagai kasus muncul ke publik dan terjadi di kota-kota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan.

Selama ini kinerja anggaran dalam proses penyusunan, pembahasan sampai pada penetapan APBD serta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), umumnya perhatian lebih terfokus pada besarnya anggaran. Penyusunan anggaran lebih menekankan pada input, di mana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kinerja anggaran lebih mengutamakan penyerapan anggaran dibandingkan melakukan penghematan dana anggaran sehingga banyak anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak terjadi efisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang meyimpang dengan tujuan atau target kebijakan pemerintah. Permasalahan lain yaitu kinerja anggaran juga selama ini memiliki kelemahan perencanaan dalam pengalokasian anggaran belanja menyebabkan lemahnya kinerja pemerintah, sehingga ada unit kerja yang kelebihan pembiayaan dan ada pula unit kerja yang kekurangan pembiayaan.

Adapun pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan karena dalam penyusunan dan proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas yang bertugas untuk meminimalisasi tindakan yang menyimpang dalam pembuatan anggaran dan dapat memenuhi sasaran yang telah ditentukan sebelumnya (Halim, 2012:191). Pengelolaan anggaran sangat penting bagi perkembangan sektor publik karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengelolaan anggaran merupakan prinsip *Value for Money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2009:20). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diterima secara umum merupakan upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas (Halim 2012:40).

Transparansi meliputi terbukanya akses informasi sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Bukan hanya untuk pihak yang berkepentingan, namun publik juga dapat mengetahui dan mengaksesnya (Sa'adah, 2015). Menurut Hasibuan, 2009 (dalam Wiguna, 2015), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja seorang pegawai adalah tujuan dan kemampuan, teladan

pimpinan, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukum dan ketegasan. Sebab dengan adanya pengawasan maka suatu pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kerja yang optimal. Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif dan lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran.

Pengawasan terhadap anggaran diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal merupakan pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa: 1) apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran ?, 2) apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran ?, 3) apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran ?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran, 2) untuk menguji pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran, 3) untuk menguji pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran.

TINJAUAN TEORITIS

Akuntabilitas

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009:20).

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan penyingkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bias menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: 1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR, 2) akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Mardiasmo, (2009:76) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu: 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), 2) Akuntabilitas proses (*process accountability*), 3) Akuntabilitas program (*program accountability*), 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Transparansi

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011:39). Transparansi juga berarti adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya. Sebagai upaya mewujudkan transparansi publik, akuntansi sektor publik berperan dalam pemberian keterbukaan informasi keuangan beserta penjelasannya dalam bentuk Catatan Atas Laporan Keuangan. Organisasi sektor publik selaku pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya dengan adanya sistem informasi akuntansi yang memadai untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan publik (Mahmudi, 2011:17).

Menurut Mahmudi, 2010 (dalam Mahmudi, 2011) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk : 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan (realisasi v.s anggaran), 2) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait, 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Pengawasan

Secara umum, pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelajaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan (Halim, 2012:146).

Beberapa tujuan pengawasan keuangan daerah dalam garis besarnya, (Halim, 2012:147) antara lain; 1) Untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, 2) Untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, 3) Untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah sebagai berikut: 1) Untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas program yang telah ditetapkan, 2) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan apbd tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan, 3) Untuk memastikan bahwa pelaksanaan apbd yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan efisien dan efektif sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Hakekatnya pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadi penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Kusdijono, 2000:125).

Jenis-jenis pengawasan keuangan daerah (APBD) dapat dibedakan berdasarkan objek, diawasi, sifat, pengawasan dan metode pengawasan (Halim, 2012:150), antara lain: 1) Pengawasan berdasarkan objek, 2) Pengawasan menurut sifat, 3) Pengawasan menurut metode.

Cara Pelaksanaan Pengawasan dibedakan antara pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung (Kusdijono, 2000:126) yaitu: 1) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan setempat, 2) Pengawasan Tidak Langsung yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat/satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan yang telah dibuat oleh semua anggota dalam sebuah organisasi. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah difokuskan kepada pengelolaan APBD sebagai wujud perencanaan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu entitas penyusun/pengguna APBD untuk pelayanan publik.

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus, dengan demikian anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun.

Anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu dalam ukuran finansial. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik (Nordriawan, 2006:48), antara lain: 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan, 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian, 3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan, 4) Anggaran sebagai Alat Politik, 5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi, 6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kinerja, 7) Anggaran sebagai Alat Motivasi

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut: 1) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik, 2) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan dan pembiayaan yang diinginkan, 3) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum, 4) Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja, 5) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Tahapan anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran terdiri dari empat tahap yang meliputi (Mardiasmo, 2009:70): 1) Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*), 2) Tahap Ratifikasi Anggaran (*Approval/Ratification*), 3) Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*), 4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran (*Reporting & Evaluation*).

Kinerja

Kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat multidimensi dan variasi pengukurannya tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu (Mahmudi, 2011:6). Menurut Mahsun, (2007:157), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kinerja merupakan prestasi yang dapat dan harus dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menunjukkan seberapa jauh tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun definisi pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting bagi perusahaan, karena pengukuran kinerja merupakan proses mengukur sejauh mana atau seberapa baik suatu perusahaan melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuannya dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi karyawan dalam mewujudkan visi perusahaan.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektifitas tindakan dalam mencapai tujuan (Mahsun, 2007:157). Penilaian, pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk jasa ataupun suatu proses.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, berdasarkan asas *money follows functions*, juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat, maka timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah harus dilaksanakan dengan pembukuan yang terang, rapi, dan pengurusan keuangan daerah harus dilaksanakan secara sehat termasuk sistem administrasinya. Dengan demikian, diharapkan daerah menyusun dan menetapkan APBDnya sendiri .

Masalah keuangan berhubungan dengan ekonomi daerah, terutama menyangkut tentang pengelolaan keuangan suatu daerah, tentang bagaimana sumber penerimaan digali dan didistribusikan oleh Pemerintah Daerah (Devas, 1995:179). Sedangkan keberhasilan perkembangan daerah terfleksikan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai pembangunan daerah. Potensi dana pembangunan yang paling besar dan lestari adalah bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah (Basri, 2003:94). Oleh karena itu, peningkatan peran atau porsi PAD terhadap APBD tanpa membebani masyarakat dan investor merupakan salah satu indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah daerah mengelola keuangan daerah secara efisien dan efektif (Saragih, 2003:133)

Konsep Value for Money

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama (Mardiasmo, 2009:4), yaitu: 1) Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value*, 2) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output* dengan *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan, 3) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Manfaat *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada publik (Halim, 2012:12), antara lain: 1) Efektivitas pelayanan publik, 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik, 3) Menghilangkan setiap inefisien dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya, 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public, 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal bukan hanya akuntabilitas vertikal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muljo *et.al* (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Pertiwi (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hipotesis, bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* karena setiap pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa agar terjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran, sehingga dapat berhasil guna dalam mencapai tujuan dan sasaran.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran. Muljo, *et.al* (2014) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* karena dalam setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka untuk masyarakat agar pengumuman anggaran

bisa didapat setiap waktu dan mudah di akses oleh publik sehingga pencapaian hasil program yang ditetapkan dapat berjalan efektif.

H₂: Transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

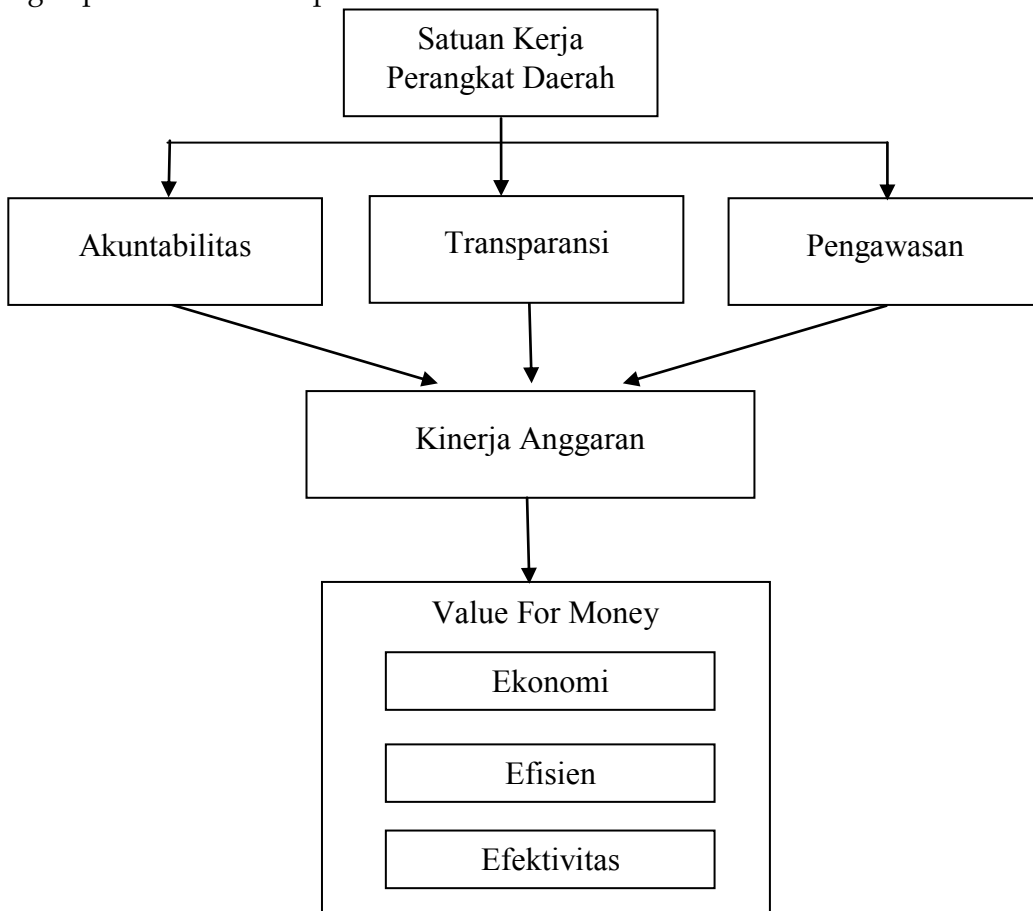
Pengawasan merupakan segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan-aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan perlu dilakukan karena dalam hal untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebelum ke tahap pelaksanaan, anggota dewan diharapkan telah mengetahui cara untuk mengawasi anggaran agar dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Anugriani (2014) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Pertiwi (2015) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran menggunakan pendekatan *value for money* karena pengawasan dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran yang dilakukan sesuai dengan undang-undang secara efektif.

H₃: Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran

Rerangka Pemikiran

Rerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih peneliti adalah penelitian kausalitas, bertujuan untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel (Sanusi, 2011:14). Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surabaya.

Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Sanusi, 2011:87). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah Kota Surabaya yang berjumlah 39 SKPD.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu (Sanusi, 2011:95). Berdasarkan metode tersebut, maka kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Dinas/Kepala Bagian di SKPD Kota Surabaya, Kepala Bagian Keuangan di SKPD Kota Surabaya.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data subjek. Data subjek merupakan jenis data penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian, (Sekaran, 2008:79). Data subjek dalam penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti (Sekaran, 2008:99).

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Akuntabilitas

Akuntabilitas, merupakan prinsip pertanggungjawaban pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan untuk memberikan informasi dan penyingkapan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat empat indikator yang mempengaruhi akuntabilitas (Mardiasmo, 2009) yaitu; 1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, 2) Akuntabilitas proses, 3) Akuntabilitas program, 4) Akuntabilitas kebijakan.

Transparansi

Transparansi, adalah adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu. Terdapat dua indikator yang mempengaruhi transparansi (PP Nomor 71 Tahun 2010) yaitu: 1) Kualitas informasi pengelolaan anggaran, 2) Kebebasan arus informasi.

Pengawasan

Pengawasan, merupakan untuk menjamin agar anggaran benar-benar sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuannya yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Terdapat tiga indikator yang mempengaruhi pengawasan (Gaspersz, 1998:287), yaitu: 1) Input (masukan) pengawasan, 2) Proses pengawasan, 3) output (keluaran) pengawasan.

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran, merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja anggaran berdasarkan *value for money*, (Mardiasmo, 2009:4) antara lain: 1) Ekonomis, 2) Efisien, 3) Efektivitas.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan atas item-item pertanyaan pada kuesioner yaitu dengan jalan menghitung koefisien korelasi dari tiap-tiap pertanyaan dengan skor total yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan angka kritis r produk moment. Bila koefisien korelasinya lebih besar dari pada nilai kritis maka suatu pertanyaan dianggap valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas, digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban yang diperoleh dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* masing-masing variabel lebih dari 60% atau 0,6 maka penelitian ini dikatakan reliabel (Ghozali, 2013:42).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Sunyoto, 2013:92).

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Salah satu cara mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cut off yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 . (Ghozali, 2013:91).

Uji Heterokedastisitas

Uji persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homokedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heterokedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi Heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi linier berganda yang merupakan alat ukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2013:96). Persamaan regresi linier berganda tersebut adalah sebagai berikut :

$$KA = a + \beta_1A + \beta_2T + \beta_3P + \varepsilon$$

Keterangan :

KA	= Kinerja Anggaran
<i>a</i>	= Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3$	= Slope atau Koefisien Regresi
A	= Akuntabilitas
T	= Transparansi
P	= Pengawasan
ε	= <i>error</i>

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kecocokan dalam penelitian ini menggunakan uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan manajemen layak atau tidak digunakan sebagai model penelitian. Adapun kriteria pengujian Ghazali, (2011: 103) adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi Uji F > 0,05, menunjukkan variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan tidak layak untuk digunakan model penelitian, (2) Jika nilai signifikansi Uji F < 0,05, menunjukkan variabel variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan layak untuk digunakan dalam model penelitian.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu (Ghozali, 2011:97). Kriteria pengujian sebagai berikut: (1) Jika nilai R² mendekati nol (semakin kecil nilai R²) berarti menunjukkan kontribusi variabel akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan publik terhadap kinerja anggaran secara simultan semakin lemah, maka model dikatakan kurang layak, (2) Jika nilai yang mendekati satu (semakin besar nilai R²) berarti menunjukkan bahwa kontribusi variabel akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan publik terhadap kinerja anggaran secara simultan semakin kuat, maka model dikatakan layak.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05), maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013: 58).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Gambaran Subyek Penelitian

Gambaran subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai SKPD Kota Surabaya yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas dan Kepala Bagian Keuangan di SKPD Kota Surabaya sebanyak 78 orang. Adapun karakteristik responden sebagai subyek penelitian digambarkan melalui jenis kelamin, usia, dan masa kerja, sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Prosen
Jenis Kelamin		
Pria	54	69,23%
Wanita	24	30,77%
Usia		
20-30 thn	9	11,54%
31-40 thn	27	34,62%
Pendidikan		
Terakhir		
D3	2	2,56%
S1	59	75,64%
S2	17	21,79%
Masa Kerja		
< 5 tahun	5	6,41%
5-10 tahun	14	17,95%
> 10 tahun	59	75,64%

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan Tabel 1 terlihat responden terbanyak adalah berjenis kelamin pria dengan prosentase sebesar 69,23%. Usia terbanyak antara 31-40 tahun dengan prosentase sebesar 34,62%. Pendidikan terakhir pegawai terbanyak adalah sarjana dengan prosentase sebesar 75,64%. Sedangkan masa kerja pegawai yang terbanyak adalah mereka yang telah bekerja diatas 10 tahun dengan prosentase sebesar 75,64%.

Tanggapan Responden

Deskriptif tanggapan dari 78 responden berkaitan dengan akutabilitas, transparansi, pengawasan serta kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kota Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 2
Tanggapan Responden

Variabel	Frekuensi					Total Skor	Mean
	STS	TS	CS	S	SS		
Akuntabilitas	0	2	83	173	54	1215	3,89
Transparansi	0	15	84	51	6	516	3,31
Pengawasan	0	6	122	95	11	813	3,47
Kinerja Anggaran	0	2	106	111	15	841	3,59

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada Tabel 2 dapat diketahui rata-rata tanggapan responden berkaitan dengan akutabilitas, transparansi, pengawasan serta kinerja anggaran menyatakan setuju. Hasil ini diindikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden dalam interval kelas termasuk dalam kategori $3,40 < x \leq 4,20$. Hanya tanggapan responden tentang transparansi yang mencatikan cukup setuju. Hasil ini diindikasikan dengan nilai rata-rata tanggapan responden tentang seluruh aspek transparansi sebesar 3,31. Dalam interval kelas termasuk dalam kategori $2,60 < x \leq 3,40$.

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas data sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Pearson Correlation	Tingkat Sig	Keterangan
Akuntabilitas	Akuntabilitas kejujuran	0,542	0,000	Valid
	Akuntabilitas proses	0,646	0,000	Valid
	Akuntabilitas program	0,615	0,000	Valid
	Akuntabilitas kebijakan	0,407	0,000	Valid
Transpransi	Kualitas informasi anggaran	0,702	0,000	Valid
	Kebebasan informasi	0,706	0,000	Valid
Pengawasan	Input pengawasan	0,513	0,000	Valid
	Proses pengawasan	0,581	0,000	Valid
	Output pengawasan	0,621	0,000	Valid
Kinerja Anggaran	Ekonomis	0,678	0,000	Valid
	Efisien	0,723	0,000	Valid
	Efektivitas	0,601	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa seluruh item pernyataan dari seluruh variabel memiliki signifikansi uji korelasi dibawah 0,05 sehingga kuesioner yang disebarakan dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas nilai *cronbach alpha* nampak pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4
Reliability Statistic

Variabel	Alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Akuntabilitas	0,625	0,60	Reliabel
Transparansi	0,618	0,60	Reliabel
Pengawasan	0,635	0,60	Reliabel
Kinerja Anggaran	0,638	0,60	Reliabel

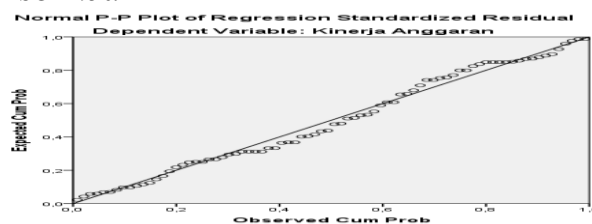
Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4 terlihat nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel lebih besar 0,60 yang berarti butir-butir pertanyaan dari seluruh variabel seluruhnya reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal, dapat diuji dengan pendekatan grafik, yaitu grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual*. Grafik normalitas disajikan dalam gambar berikut:



Sumber: Data Primer diolah

Gambar 2
Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas terlihat distribusi data telah mengikuti garis diagonal antara 0 (nol) dengan pertemuan sumbu Y dengan sumbu X. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini telah berdistribusi normal. Kondisi ini dapat dipertegas dengan melihat hasil normalitas melalui pendekatan Kolmogorov Smirnov sebagai berikut :

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,03464342
Most Extreme Differences	Absolute	,071
	Positive	,071
	Negative	-,066
Kolmogorov-Smirnov Z		,626
Asymp. Sig. (2-tailed)		,828

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai *Asymp sig (2-tailed)* sebesar $0,828 > 0,050$, hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

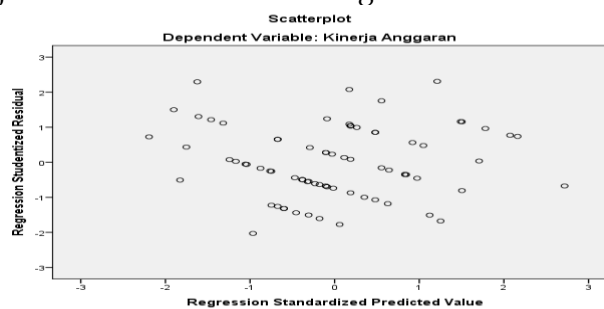
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
	(Constant)		
1	Akuntabilitas	,804	1,243
	Transparansi	,816	1,225
	Pengawasan	,937	1,067

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai VIF pada seluruh variabel tersebut lebih kecil dari 10, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka hal ini berarti dalam persamaan regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau bisa disebut juga dengan bebas dari Multikolinieritas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Heterokedastisitas

Hasil grafik pengujian Heterokedastisitas sebagai berikut:



Sumber: Data primer diolah

Gambar 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari gambar diatas terlihat sebaran titik-titik berada diatas dan dibawah sumbu Y dan tidak membentuk pola yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model analisis tidak terjadi gangguan Heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor yang digunakan dalam model penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi, pengawasan terhadap kinerja anggaran sektor publik secara linier. Dalam pengujian regresi yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2,388	1,597	1,495	0,139
Akuntabilitas	0,202	0,093	2,165	0,034
Transparansi	0,394	0,135	2,910	0,005
Pengawasan	0,253	0,116	2,193	0,031

Sumber: Data Primer diolah

Dari data Tabel 7 persamaan regresi yang didapat adalah sebagai berikut:

$$KA = 2,388 + 0,202A + 0,394T + 0,253P$$

Hasil Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan digunakan untuk menguji variabel dalam penelitian yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, pengawasan layak atau tidak digunakan sebagai prediktor. Hasil pengujian yang telah dilakukan tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	36,867	3	12,289	11,033	,000 ^b
Residual	82,427	74	1,114		
Total	119,295	77			

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan pada Tabel 8 di dapat tingkat signifikan uji F = 0,000 < 0,05, yang mengidentifikasi bahwa pengaruh variabel bebas yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, pengawasab secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Hasil ini mengindikasikan model yang digunakan dalam penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase kontribusi variabel akuntabilitas, transparansi, pengawasan secara bersama-sama terhadap kinerja anggaran. Hasil pengujian yang telah dilakukan tampak pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,556 ^a	,309	,281	1,05541

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 9 diatas diketahui R Square (R^2) sebesar 0,309 menunjukkan sumbangan atau kontribusi dari akuntabilitas, transparansi, pengawasan secara bersama-sama terhadap kinerja anggaran sebesar 30,9%. Sedangkan sisanya ($100\% - 30,9\% = 69,1\%$) dikontribusi oleh faktor lainnya.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α (asumsi tarif nyata 0,05), maka dapat dikatakan adanya hubungan yang kuat atau positif antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2013:58). Berikut hasil uji t dengan menggunakan SPSS 20.0 dapat dilihat Tabel 10, sebagai berikut:

Tabel 10
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	2,388	1,597	1,495	,139
1 Akuntabilitas	,202	,093	2,165	,034
Transparansi	,394	,135	2,910	,005
Pengawasan	,253	,116	2,193	,031

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 10 dapat diinterpretasikan bahwa: (1) Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan $0,034 < 0,05$ sehingga hipotesis pertama diterima. (2) Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan $0,005 < 0,05$ sehingga hipotesis kedua diterima. (3) Pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikan $0,031 < 0,05$ sehingga hipotesis ketiga diterima.

Pembahasan

Untuk dapat menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi. Kinerja Instansi Pemerintah dalam penyusunan anggaran digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran. Pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* atau pengawasan atas kinerja output. *Value for money* harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai *good governance* yaitu Pemerintah Daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien.

Hasil analisis statistik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran SKPD kota Surabaya. Kondisi ini mengindikasikan model yang digunakan dalam penelitian layak dilanjutkan pada analisa berikutnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa naik turunnya kinerja anggaran SKPD kota Surabaya tergantung oleh seberapa baik pengelolaan keuangan daerah dari segi akuntabilitas, transparansi maupun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil ini didukung dengan

perolehan koefisien korelasi sebesar 0,556 yang menunjukkan korelasi atau hubungan antara variabel tersebut secara simultan terhadap kinerja anggaran sebesar 55,6% dan dapat dikatakan memiliki hubungan yang erat.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif. Hasil ini mencerminkan semakin kuat penerapan akuntabilitas, maka semakin tinggi pula kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Hal ini dikarenakan untuk menghasilkan kinerja anggaran yang baik dibutuhkan pertanggungjawaban anggaran agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang diharapkan. Semakin baik pertanggungjawaban menunjukkan bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik. Hasil ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2009:45), menyatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara, menimbulkan persepsi aparatur terhadap kinerja layanan publik. Terlebih lagi tuntutan akuntabilitas membuat para aparatur negara lebih memfokuskan pelayanannya terhadap masyarakat. Hasil ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adiwirya, (2015) serta Pertiwi (2015) yang memperlihatkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif. Transparansi dapat diartikan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin baik sifat transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran akan semakin meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep *value for money* dalam menghasilkan anggaran yang diharapkan. Pengelolaan anggaran yang transparan menjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat. Adanya transparansi, maka tuntutan masyarakat terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan oleh aparatur negara menimbulkan persepsi dari masing-masing aparatur terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Persepsi dari masing-masing aparatur negara pengungkapan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan publik yang dapat diketahui oleh masyarakat. Adanya transparansi diharapkan kualitas pelayanan publik semakin bertambah baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2014) dan Adiwirya (2015) yang memperlihatkan adanya pengaruh signifikan dan positif antara pengelolaan anggaran yang transparan dengan kinerja anggaran. Dengan transparansi yang dilakukan secara baik dan memang benar transparan, akan memberikan pengetahuan langsung kepada publik dan pengawasan yang lebih baik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kinerja pemerintah daerah secara khusus dan umum dapat meningkat sesuai kegiatan yang telah dilakukan dan diawasi.

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran adalah signifikan dan positif. Kondisi ini memperlihatkan semakin baik pengawasan yang dilakukan atas pengelolaan anggaran akan semakin meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran tersebut. Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri (pengawasan internal). Perlu adanya pengawasan internal yang baik dalam pengelolaan sebuah anggaran untuk mengetahui atau mengevaluasi kinerja anggaran agar kinerja dapat berjalan dengan baik. Pengawasan internal memberikan keyakinan yang memandai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektivitas merupakan elemen utama dari kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada organisasi sektor publik. Adanya pengawasan atas pengelolaan anggaran berarti mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Anugriani (2014) dan Pertiwi (2015) yang memperlihatkan hasil adanya pengaruh positif dan signifikan antara pengawasan dengan kinerja anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa tentang akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap kinerja anggaran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Hasil pengujian pertama menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran. Hasil ini mencerminkan semakin kuat penerapan akuntabilitas menunjukkan bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, (2) Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran. Kondisi ini memperlihatkan dengan adanya transparansi dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (3) Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan sebagai berikut: (1) Untuk penelitian selanjutnya mempertimbangkan dalam menentukan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup provinsi, (2) Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan wawancara untuk meningkatkan pemahaman terhadap jawaban responden, (3) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang masih mempengaruhi kinerja anggaran misalnya motivasi, kejelasan sasaran, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adiwirya, M. F. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 11(2).
- Anugriani, R. M. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Basri, Y. Z. 2003. *Keuangan Negara dan Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Devas, N. 1995. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UJ Press. Jakarta.
- Gaspersz, V. 1998. *Manajemen Produktivitas Total*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS*. Edisi Ketujuh. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang..
- Hadyrianto, P. 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara. Jakarta.
- Halim, A. 2012. *Akuntansi Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kusdijono. 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. PT MUDAYA. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Ofset. Yogyakarta
- Muljo, H., H. Kurniawati dan Pahala. 2014. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 2(11).
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pertiwi, D. P. 2015 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntanasi dan Keuangan* 2(2).
- Pramono, A. H. 2002. Pengawasan Legislatif terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Brawijaya. Malang.
- Sa'adah, B. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran melalui E-Government. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga* 3(2).
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. PT Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sekaran, U. 2008. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sunyoto, D. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. PT Refika. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Wiguna, M. B. S., G. A. Yuniartha, dan N. A. S. Darmawan. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1).